

PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN AIPAC (AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE) TERHADAP HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT– ISRAEL PADA MASA PRESIDEN DONALD TRUMP (2017-2021)



Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FRANSISCO HILARIAN MANDEY

E061191120

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN AIPAC (AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE) TERHAHADAP HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT-ISRAEL PADA MASA PRESIDEN DONALD TRUMP (2017-2021)

Disusun oleh:

Fransisco Hilarian Mandey

E061191120

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN AIPAC
(AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE)
TERHADAP HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT-ISRAEL
PADA MASA PRESIDEN DONALD TRUMP (2017-2021)

N A M A : FRANSISCO HILARIAN MANDEY

N I M : E061191120

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 28 Juni 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Prof. H. Dalwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Aswin Baharuddin S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Pt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN AIPAC
(AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE)
TERHADAP HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT-ISRAEL
PADA MASA PRESIDEN DONALD TRUMP (2017-2021)

N A M A : FRANSISCO HILARIAN MANDEY

N I M : E061191120

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 27 Juni 2024.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



[Handwritten signatures in blue ink over the list of names]

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransisco Hilarian Mandey
NIM : E061191120
Program Studi : S1- Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 28 Juni 2024

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000" and "METERAI TEMPEL". The serial number "B4770ALX250684218" is visible at the bottom left of the stamp.

(Fransisco Hilarian Mandey)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransisco Hilarian Mandey
NIM : E061191120
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH KELOMPOK KEPENTINGAN AIPAC (*AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE*) TERHADAP HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT-ISRAEL PADA MASA PRESIDEN DONALD TRUMP (2017-2021)”

bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 28 Juni 2024
Yang menyatakan,



(Fransisco Hilarian Mandey)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan lindungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kelompok Kepentingan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Israel Pada Masa Presiden Donald Trump”**. yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Skripsi ini mulai dari Konsep, isi hingga penulisan. meskipun demikian besar harapan penulis agar tulisan ini dapat menjadi sumbangsih dari penulis bagi ilmu Hubungan Internasional terutama bagi mereka yang memiliki ketertarikan dalam mengkaji hubungan Amerika Serikat dan Israel, Kelompok Kepentingan dan Lobi AIPAC. akhir kata penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu penulis selama berkuliah di Universitas Hasanuddin:

1. Terima Kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Kasih dan Penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. tanpa pertolongan-Nya Penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Terima Kasih Kepada keluarga penulis terutama orang tua ayah **Fredryk Welliam Mandey** dan Ibu **Patricia Jacinta Palit** yang telah membantu penulis dalam mengingatkan dan memberikan motivasi agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya
4. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri Tamma, M.si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
5. Bapak **Prof. Drs. H. Darwis, MA, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional sekaligus sebagai pembimbing skripsi I

6. Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku penasehat akademik dan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam konsultasi KRS hingga membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
7. Terima Kasih kepada seluruh Dosen, Staff dan Pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, dedikasi kepada penulis selama penulis berkuliah di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. secara khusus penulis ingin berterima kasih kepada Pak Ridho dan Ibu Rahma yang selalu membantu penulis terutama berkaitan dengan persuratan
8. Terima Kasih Kepada teman-teman KKN Desa Wisata Maros, Kecamatan Marusu dan Maros Baru yang telah menemani saya selama masa KKN (Kuliah Kerja Nyata)
9. Terima Kasih kepada teman-teman Angkatan 2019 yang telah mejadi teman penulis selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Secara khusus kepada teman-teman pijal Squad yang setia menemani saya selama perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
10. Akhirnya penulis berterima kasih kepada seluruh pihak baik yang telah penulis cantumkan maupun yang tidak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan, kuliah kerja nyata (KKN) dan magang. Penulis memohon maaf atas segala tindakan penulis yang kurang berkenan selama proses tersebut. semoga Rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua Amin.

Makassar, 1 Mei 2024

Fransisco Hilarian Mandey

ABSTRAK

Fransisco Hilarian Mandey, E061191120, “**Pengaruh Kelompok Kepentingan AIPAC (AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE) Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Israel Pada Masa Presiden Donald Trump (2017-2021)**”, dibawah bimbingan Prof. H. Darwis, MA, Ph.D selaku pembimbing pertama dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing kedua, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump. penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa Donald Trump serta Strategi dan Pengaruh Kelompok kepentingan AIPAC Pada masa Presiden Donald Trump.

Penelitian ini menggunakan dua Konsep dalam Hubungan Internasional yakni Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) dan Konsep Kelompok Kepentingan (*Interest Group*). Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) akan menjelaskan kepentingan nasional masing-masing negara (Amerika Serikat dan Israel) dan bagaimana kepentingan nasional tersebut mempengaruhi hubungan antar kedua negara tersebut. Berikutnya konsep yang digunakan adalah kelompok Kepentingan (*Interest Group*) dalam konsep kelompok kepentingan (*Interest Group*) akan dijelaskan bagaimana pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel pada Masa Donald Trump Sangat dekat. Kedekatan Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump dipengaruhi oleh Faktor AIPAC sebagai pendukung utama kebijakan Trump di Timur-Tengah.

Kata Kunci : AIPAC, Amerika Serikat, Israel, Kepentingan Nasional, Kelompok Kepentingan

ABSTRACT

Fransisco Hilarian Mandey, E061191120, “**The Influence Of The Group Interest Of AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) Toward The Relationship Between United States And Israeli At The Presidential Period Of President Donald Trump (2017-2021)**”, under supervising by Prof. H. Darwis, MA, Ph.D as 1st Supervisor and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as 2nd supervisor, Department of International Relation, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research is aim to investigate how far the influence of AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee) to the relationship between United States and Israeli government during the presidential term of President Donald Trump (2017-2021). The descriptive approach via in-dept literatures review methods was implemented in this research. Further, this research would describe how the AIPAC interest group influences the relationship between United States and Israeli and the strategy that being used in this matter.

Two principal concepts of national and group interest have been applied in this investigation. National interest described how each national interest of United States and Israel influenced the political relationship between both country. Further, interest group concept described how the interest group like AIPAC influenced the brelationship between United States and Israel in the presidential term of President Donald Trump

The final results clearly shown that there is a significant influence of the AIPAC interest group, as a major supporting in President Trump policy at the middle east, towards the very close relationship between United States and Israeli Government at the presidential term of President Donald Trump.

Keywords: *AIPAC, United States, Israel, National Interest, Group Interest*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konsep.....	9
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kepentingan Nasional (National Interest)	14
B. Kelompok Kepentingan (Interest Group)	23
C. Penelitian Terdahulu	30
BAB III GAMBARAN UMUM	32
A. Sejarah dan Dinamika Hubungan Amerika Serikat - Israel	32
a. Dukungan Terhadap Zionisme	34
b. Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat.....	46
B. Kelompok Kepentingan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).....	50
a. Sejarah Kelompok Kepentingan AIPAC.....	50
b. Tujuan Kelompok Kepentingan AIPAC	52
c. Ukuran dan Kegiatan Kelompok AIPAC.....	52
d. Keberhasilan AIPAC Sebagai Kelompok Lobi.....	54
e. Kritikan Terhadap AIPAC.....	55

BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Hubungan Amerika Serikat – Israel Pada Masa Presiden Donald Trump	57
a. Trump Peace Plan	59
b. Abraham Accord.....	68
B. Strategi dan Pengaruh Kelompok AIPAC Terhadap Hubungan Amerika Serikat – Israel Pada Masa Presiden Donald Trump	74
a. Strategi Kelompok AIPAC dalam memengaruhi Hubungan Amerika Serikat-Israel Pada Masa Presiden Donald Trump	74
b. Pengaruh Kelompok AIPAC Terhadap Hubungan Amerika Serikat-Israel Pada Masa Presiden Donald Trump	77
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	12
Gambar 2 Tabel total Obligasi bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Israel	46
Gambar 3 Grafik bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Israel (1950-2020)	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Normalisasi hubungan antara Israel dengan empat negara di kawasan Teluk Arab dan Afrika Utara yakni, Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko pada tahun 2020 merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah hubungan internasional. Normalisasi ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kepala Penasihat Senior-nya Jared Kushner. (U.S. Department of State, 2020; US-Israeli Partnership and Abraham Accords Enhancement Acts of 2023) yang tercantum dalam *Abraham Accord* sebagai tindak lanjut proposal perdamaian Israel-Palestina yang diluncurkan pada awal Januari 2020 (Holland, Williams, & Mohammed, 2020). Peristiwa normalisasi ini juga memberikan dinamika baru dalam peta politik kawasan Timur-Tengah yakni Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko, yang selama ini berkonflik dengan Israel pada akhirnya memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel serta menjalin kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti lain sosial, politik, ekonomi, dan pariwisata (Federico-O'Murchu, 2020).

Keberhasilan proses normalisasi ini tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan lobi Yahudi, yaitu pribadi atau kelompok masyarakat Yahudi, yang melakukan berbagai aktivitas lobi untuk memengaruhi pemerintah Amerika Serikat agar membuat kebijakan politik yang berpihak pada pemerintah Israel, termasuk bertindak sebagai fasilitator normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara tetangganya. Kiprah dan keterlibatan kelompok lobi Yahudi ini dimulai dengan

pembentukan World Zionist Organization (WZO), dalam Kongres Zionis Pertama pada tahun 1897, yang menyepakati pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di wilayah Arab-Palestina dan upaya-upaya untuk membangkitkan perasaan serta kesadaran sebagai orang Yahudi (World Zionist Organization, 1947). Selanjutnya, WZO mengembangkan sayap politiknya di Amerika Serikat dengan membentuk Federation of American Zionists (FAZ) berpusat di Kota New York, dan pada tahun 1917 berganti nama menjadi Zionist Organization of America (ZOA). Meskipun ZOA secara fakta merupakan organisasi Zionis tertua di Amerika Serikat, namun peran politiknya relatif masih kecil disebabkan oleh besarnya jumlah anggota ZOA yang menentang gerakan Zionisme.

Pada Tahun 1906 sekelompok anggota Komunitas Yahudi Amerika melakukan pertemuan di Hotel Savoy New York untuk membentuk American Jewish Committee (AJC), yaitu kelompok advokasi yang dibentuk sebagai bentuk keprihatinan atas pelanggaran terhadap hak-hak Orang Yahudi. Berbeda dengan kelompok ZOA yang secara politik terbelah, maka kelompok AJC ini cenderung lebih solid secara organisasi dalam mendukung Gerakan Zionisme di Amerika Serikat yang pada awalnya tidak mendapat dukungan diantara anggota komunitas Yahudi di Amerika Serikat, namun perlahan-lahan mulai memperoleh dukungan kuat ketika mantan hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis mulai melibatkan diri dalam organisasi Federasi Zionis Amerika pada tahun 1912 (Gurock, 1998).

Perlakuan buruk dan pelanggaran terhadap hak-hak azasi orang Yahudi di Eropa kemudian mendapat simpati Woodrow Wilson yang merupakan presiden

Amerika Serikat pada saat itu. Presiden Wilson memberikan persetujuannya terhadap Deklarasi Balfour dalam sebuah pernyataan pada tanggal 2 Maret 1919. (Walworth,1986). Pada tahun 1922 Kongres Amerika mengesahkan sebuah resolusi bernama Lodge-Fish, yang isinya mendukung mandat Inggris terhadap Palestina. dan menyetujui Pembentukan Rumah Nasional Bagi Orang Yahudi (Raymond, 1992). Selanjutnya, selama Perang Dunia II kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dipusatkan pada perang yang sedang berlangsung sehingga kurang memerhatikan masalah orang Yahudi. Disaat Perang Dunia II ini kelompok lobi Yahudi melaksanakan Kongres di Baltimore untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang menjadi alternatif penyelesaian akhir bagi bagi Gerakan Zionisme serta langkah praksis guna mewujudkan rumah bersama orang Yahudi (Levitats, 1943). Penyelesaian akhir yang dirumuskan dalam Kongres Yahudi di Baltimore ditolak oleh Kementerian Perang Amerika Serikat dengan dasar pertimbangan yaitu situasi dan kondisi di wilayah Arab yang akan menjadi sangat tidak kondusif ketika resolusi tersebut dilaksanakan karena akan mengakibatkan penentangan oleh orang-orang Arab, dan pada akhirnya resolusi tersebut di batalkan (Rubenberg, 1986).

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca Perang Dunia II mendorong Inggris sebagai pemegang mandat Liga Bangsa-Bangsa atas Palestina untuk mengembalikan mandatnya atas Palestina, serta membawa keinginan tersebut di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai tanggapannya PBB kemudian membentuk komite khusus yaitu United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) dengan tujuan untuk menentukan masa depan mandat

Inggris atas Palestina. Sepanjang proses penyelidikan oleh komite khusus UNSCOP, kelompok Zionist Amerika ini melakukan berbagai lobi kepada pemerintah Presiden Truman. Kelompok Lobi Zionist berpengaruh sangat signifikan dalam percaturan politik di Amerika Serikat serta tidak dapat dianggap remeh (Mearsheimer & Walt, 2007), khususnya bagi Partai Demokrat (Partai Presiden Truman), yang sebagian besar konstituennya berasal dari kalangan pemilih Yahudi. (Cohen, 1990). Selanjutnya, Cohen (1990) juga menyatakan bahwa Presiden Truman merasa sakit hati kepada kelompok Yahudi yang berhasil memengaruhi sistem pemilihan anggota kongres pada tahun 1946 dan merugikan Partai Demokrat.

Pengaruh lobi Yahudi dalam rencana pembagian wilayah mantan mandat Inggris yaitu Palestina sangat kuat yang dibuktikan dengan terjadinya penundaan waktu pemungutan suara terhadap Resolusi PBB No.181. Penundaan waktu ini menjadi kesempatan bagi kelompok lobi Yahudi untuk menekan negara-negara yang mendukung resolusi tersebut. Beberapa negara seperti Liberia melaporkan bahwa Duta Besar Liberia untuk Amerika Serikat mengeluhkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat akan melakukan pemotongan bantuan kepada Liberia jika negara itu memilih untuk menentang Resolusi PBB 181 (Quigley, 1990). Selanjutnya, Inggris kemudian secara resmi mengakhiri mandatnya di wilayah Palestina tersebut pada tanggal 14 Mei 1948, dan hari itu juga Israel, melalui Komite Yahudi dipimpin oleh David Ben-Gurion, mendeklarasikan kemerdekaannya dan Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakui

Israel sebagai negara merdeka. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Israel pecah perang antara Israel dan Negara-Negara Arab (Simanjuntak, 2019).

Terbentuknya negara Israel menjadi awal dimulai babak baru bagi perjalanan kelompok lobi Yahudi di Amerika Serikat. Pada tahun 1949 dibentuklah sebuah Organisasi Lobi Israel bernama American Zionist Council (AZC) untuk mewakili kepentingan Israel di Gedung Putih. AZC di bawah pimpinan Isaiah L. Kenen kemudian membentuk kelompok American Zionist Committee for Public Affairs (AZCPA) yang menjadi cikal bakal organisasi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) (Tivnan, 1987), yang resmi terbentuk tahun 1953. Namun demikian pengaruh AIPAC sebagai sebuah organisasi lobi baru dimulai sekitar tahun 1970-an, ketika AIPAC menjadi salah satu organisasi lobi utama yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur-Tengah agar memihak kepentingan Israel. Kelompok AIPAC beranggotakan tokoh-tokoh Yahudi yang berpengaruh di Amerika Serikat yang menurut laporan terkait dengan sebuah organisasi yang bernama Political Action Committee (PAC) yang beranggotakan para donatur dana untuk kepentingan kampanye. (Geier, 2016)

Pada pemilihan tahun 1984, Senator Charles H. Percy dari negara bagian Illinois dialahkan oleh Seorang senator Partai Demokrat yaitu Paul Simon yang didukung oleh Kelompok AIPAC. Senator Charles H. Percy adalah Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat (pada saat itu) dan merupakan pendukung utama penjualan senjata ke Arab Saudi, dan dua tahun sebelumnya kandidat yang didukung oleh AIPAC, Richard J Durbin berhasil mengalahkan petahana Senator

Paul Findley yang telah menunjukkan simpati terhadap pemimpin People Liberation Organization (PLO) Yasser Arafat (Stolberg, 2019)

Kemenangan Senator Charles H Percy dan Richard J Durbin memperkuat posisi tawar kelompok AIPAC pada peta lobi di Senat Amerika Serikat dan akan bertahan selama bertahun-tahun. Berdasarkan data tahun 2022 kelompok AIPAC telah menghabiskan dana sekitar 2 miliar dollar untuk mendukung kebijakan Pro-Israel, dan jumlah ini jauh melebihi dana yang dikeluarkan oleh kelompok lobi Yahudi lainnya. (Open Secrets, 2022)

Tahun 2021, AIPAC berhasil telah mengamankan dua prioritas utama lobinya di Capitol Hill, diantaranya undang-undang yang mendorong pemerintahan Biden untuk memperluas Abraham Accords ke negara-negara yang belum menjalin hubungan dengan Israel, sekutu dekat Amerika Serikat di Timur-Tengah (Harris, 2021). Undang-Undang ini diisiasi oleh kelompok bipartisan yang terdiri dari 18 senator.

Dalam pemilihan umum paruh waktu tahun 2022, Kelompok AIPAC membentuk sebuah komite yaitu Political Action Committee (PAC) yang menyumbangkan uang sebesar 17 Juta Dollar kepada 365 calon dari Partai Republik maupun Demokrat untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Pro-Israel. Political Action Committee (PAC) bentukan AIPAC ini jauh lebih Besar dari PAC bentukan kelompok lobi yang lain. (Ben-David, 2022).

Kuatnya pengaruh kelompok lobi AIPAC dalam politik Amerika Serikat terutama yang terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menuai banyak perdebatan dan kritik dari berbagai pihak. Mantan senator negara bagian

Arkansas periode 1960-an J. William Fulbright menyatakan bahwa kelompok lobi AIPAC telah mengumpulkan dana melalui badan Yahudi dan kelompok lobi tersebut menguasai Senat Amerika Serikat. Kelompok lobi AIPAC juga mendapat kritik karena dinilai hanya menguntungkan kelompok garis keras Pro-Israel (Greenwald, 2007). Hal ini juga didukung oleh Lembaga Survey Pew Research Center yang menemukan data bahwa hanya 38% orang Yahudi Amerika yang percaya bahwa pemerintah Israel sungguh-sungguh mengejar perdamaian; 44% percaya bahwa pembangunan pemukiman baru berpotensi mengancam keamanan nasional Israel. (Pew Research Center, 2013)

AIPAC sebagai sebuah kelompok lobi dikenal memiliki kemampuan yang hebat dalam memengaruhi perpolitikan Amerika Serikat karena pelobi profesional yang dimilikinya. Para pelobi profesional tersebut membantu AIPAC untuk dengan mudah mengamankan kepentingan nasional Israel di Kongres. AIPAC juga memiliki perwakilannya di seluruh negara bagian di Amerika Serikat sehingga memudahkan kelompok lobi ini untuk melobi dengan mudah siapapun anggota Kongres yang mereka inginkan. (Sari, 2016). Selanjutnya, pengaruh Organisasi AIPAC terhadap hubungan Israel dan Amerika Serikat akan dianalisis oleh penulis dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap hubungan Amerika Serikat-Israel pada masa Presiden Donald Trump” (2017-2021)**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan dipusatkan pada dua hal yaitu sejarah hubungan bilateral Amerika Serikat dan Israel serta strategi dan pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap dinamika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Israel.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.
2. Bagaimana strategi dan pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump.
2. Untuk mengetahui strategi dan pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum dan secara khusus pada Ilmu Hubungan Internasional menyangkut isu hubungan Amerika Serikat-Israel serta bagaimana

pengaruh kelompok AIPAC terhadap hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump. (2017-2021)

2. Sebagai sumber kepustakaan terkini untuk penelitian yang berkaitan dengan kelompok Lobi, khususnya lobi Yahudi dan pengaruhnya terhadap hubungan Amerika Serikat-Israel.

D. Kerangka Konsep

Penelitian ini menggunakan dua konsep dasar yaitu konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) dan Kelompok Kepentingan (Interest Group). Konsep kepentingan nasional (*National Interest*) akan menjelaskan bagaimana kepentingan nasional suatu negara, dalam hal ini kepentingan nasional Amerika Serikat dan Israel, akan memengaruhi dinamika hubungan bilantara keduanya dan konsep kelompok kepentingan akan menjelaskan bagaimana suatu kelompok kepentingan (dalam hal ini AIPAC) dapat memengaruhi dinamika hubungan antar dua Negara yakni Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump.

1. Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan Nasional (National Interest) secara umum mengacu pada tujuan, cita-cita, dan tata-nilai yang diperjuangkan oleh suatu negara yang berdaulat dan sekaligus menjadi dasar dari kebijakan luarnegerinya (Frankel, 1970). Selanjutnya, Donnelly (2000) dalam buku berjudul *Realism and International Relations* menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah proses untuk meraih kekuasaan, keamanan dan Kekayaan. Di sisi lain kepentingan

nasional sebuah negara juga dapat dilihat dari sisi penyusunan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut guna mewujudkan kepentingan nasionalnya (Metea, 2020). Kepentingan Nasional sebuah negara juga dapat diwujudkan dalam interaksi dengan negara lain yang lazim dikenal sebagai Hubungan Internasional (Ota, 2022).

Kaum realis berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat terwujud negara tersebut dapat menunjukkan dominasinya terhadap negara lain, dan dari dominasi itu akan tergambar seberapa kuat negara tersebut dalam suatu sistem Hubungan Internasional (Manan, 2017). Alasan itulah yang mendorong setiap negara di dunia berjuang keras untuk meraih kekuasaan (Morgenthau, 2006). Selanjutnya, kekuasaan itu dapat membantunya mencapai semua aspek atau segi yang berhubungan dengan kepentingan nasionalnya, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan (Wu, 2017).

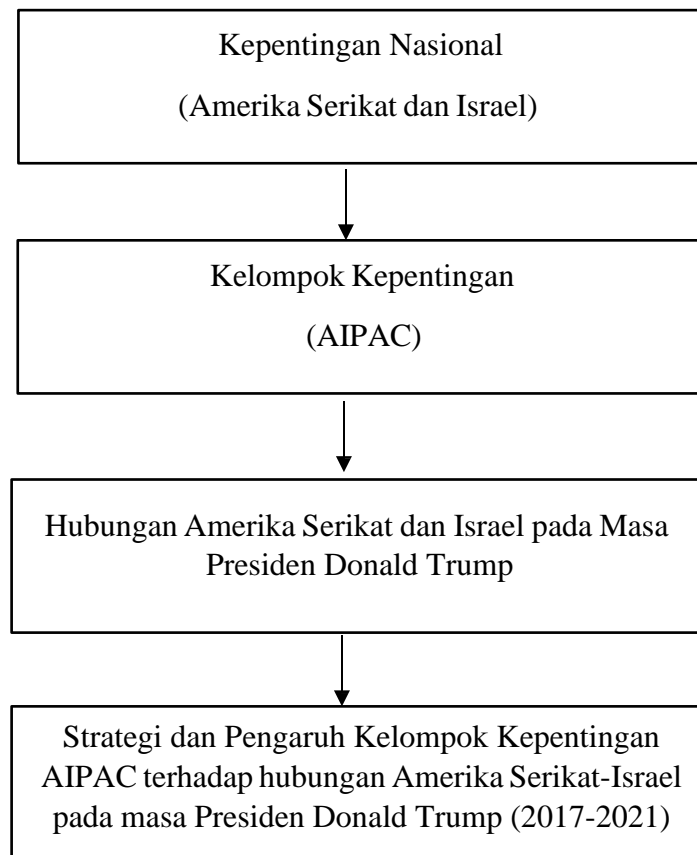
2. Teori Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), biasa juga disebut dengan istilah lain seperti kelompok penekan, asosiasi publik, adalah kumpulan orang dengan kesamaan tujuan dan mengorganisasikan diri untuk melindungi diri dan mencapai tujuan kelompoknya. Capaian akhir dari kelompok kepentingan ini adalah untuk memengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya (Baroni dkk., 2014). Selanjutnya Kelompok Lobi adalah kelompok yang menggunakan berbagai pengaruh yang dimilikinya untuk memengaruhi opini publik yang akhirnya berujung pada

kemampuan untuk juga memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh negara. (Giorno, 2019). Kelompok kepentingan dan lobi ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam sistem sosial dan politik negara. (Wallack, 1994)

Dalam bukunya yang berjudul *Health Policy: an Introduction to Process and Power*, Walt (1994) memperluas definisi kelompok kepentingan menjadi kelompok elemen masyarakat yang bekerjasama untuk tujuan yang sama tetapi tanpa maksud untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kelompok kepentingan beranggotakan berbagai komponen sosial dalam masyarakat, antara lain kelompok lembaga sosial masyarakat, serikat pekerja, akademisi, pengusaha dan lain-lain yang memiliki kepentingan terhadap satu isu tertentu. Meskipun memiliki kepentingan yang sama terkadang dalam satu isu tertentu anggota kelompok kepentingan ini bisa menolak atau setuju terhadap suatu kebijakan, namun karena adanya adanya kepentingan yang sama tersebut mereka dapat bersatu untuk mempengaruhi suatu kebijakan agar menguntungkan mereka. (Kusumowardoyo, 2022)

Kelompok Kepentingan bertindak di dasarkan pada posisi kelompok tersebut di berbagai bidang diantaranya seperti bidang politik, sosial, ekonomi, moral dan agama. Kelompok-Kelompok yang berasal dari berbagai bidang tersebut menggunakan berbagai sarana seperti melobi pemerintah, melakukan kampanye di media massa, melakukan aksi nyata seperti berdemo, serta melakukan jajak pendapat.



Bagan I: Kerangka Konsep

E. Metode Penelitian

1. Tipe metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan sejarah hubungan Amerika Serikat-Israel, hubungan Amerika Serikat-Israel pada masa Presiden Donald Trump serta strategi dan pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap hubungan antara Amerika Serikat dan Israel pada masa kepresidenan Presiden Donald Trump yaitu 2017-2021

2. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan. Menurut (Nazir, 2013), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui analisis terhadap buku, jurnal, buletin, media cetak, surat kabar, sumber internet, dan berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ingin diselesaikan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dimana data-data tidak diuraikan dalam bentuk angka, melainkan dianalisis menggunakan teori dan konsep untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat.

4. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif, dimana akan dijelaskan deskripsi umum dari judul yang diangkat yakni Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Israel, kemudian dilanjutkan ke hal-hal yang khusus yakni hubungan Amerika Serikat dan Israel pada masa Presiden Donald Trump serta strategi dan pengaruh kelompok AIPAC terhadap hubungan Amerika Serikat-Israel pada masa Presiden Donald Trump.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepentingan Nasional (National Interest)

Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki kepentingan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya; selanjutnya melalui berbagai cara berusaha untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan tersebut bisa diwujudkan. Di level yang lebih tinggi yakni negara juga memiliki kepentingannya sendiri. Selanjutnya, manusia sebagai anggota masyarakat dalam tataran negara memunculkan kepentingan yang dikenal dengan sebutan *National Interest* (*kepentingan nasional*). Secara umum kepentingan nasional diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakatnya; dan jika tidak terpenuhi akan memunculkan dampak sosial tertentu. Selanjutnya, kepentingan nasional suatu negara dalam penjabarannya tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan negara lain yang dapat dilakukan dengan cara yang baik, seperti diplomasi dan persahabatan, maupun menggunakan cara-cara yang lebih keras seperti pemaksaan atau bahkan invasi dengan kekuatan militer. Kepentingan nasional lahir bersamaan dengan hadirnya sistem yang disebut negara.

Istilah kepentingan nasional sendiri berasal dari ungkapan seorang penulis Italia yaitu Giovanni della Casa yang mengenalkan istilah *ragione degli stati* (Burns,1991). Pemikir Italia lainnya yakni Niccolo Marchiavelli menggunakan istilah "*reason of state*" sebagai frasa awal dari konsep kepentingan nasional. Konsep *reason of state* inilah yang digunakan oleh negara-negara di dunia terutama di Eropa sebagai pembenaran dari perang mereka. Ketika terjadi perang tiga puluh

tahun antara Prancis dan Kekaisaran Romawi Suci, Prancis menggunakan istilah *raison d'État* untuk membela kepentingan nasionalnya. (Franklin, 2001)

Kepentingan nasional mengandung dua aspek yang paling menonjol yakni *State* (negara), dan juga *Interest* (kepentingan). *State* (negara) berasal dari kata *Status* (Bahasa Latin) yang berarti kondisi atau keadaan; dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *Etat*; *Staat* (bahasa Jerman dan Belanda), dan *Estado* (bahasa Spanyol). Dalam perumusan dan pembentukan kepentingan nasional negara merupakan faktor yang dominan karena semua kepentingan nasional dibuat untuk kebaikan suatu negara; namun demikian aspek kepentingan merupakan faktor pendukung yang penting untuk terwujudnya kepentingan nasional. Dengan adanya kepentingan maka negara dapat mewujudkan hal-hal yang baik untuk kebaikannya. Oleh karena itu kedua aspek ini merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan nasional.

Seiring berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan tentang hubungan antar negara (hubungan internasional) maka pandangan tentang konsep kepentingan nasional mengalami banyak perubahan (Sudarsono *et al.*, 2018) sehingga definisi kepentingan nasional yang menjadi lebih dinamis dan inovatif. Beberapa ahli ilmu politik mengemukakan pengertian dan definisi tentang kepentingan nasional, antara lain:

Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi warga negaranya dari ancaman pihak luar, dan untuk mengatasi ancaman dari luar tersebut pemimpin negara menyusun

serangkaian kebijakan terhadap negara lain baik yang bersifat kerjasama ataupun konfrontasi (Morgenthau, 1951)

Donald E. Nuechterlein menjabarkan kepentingan nasional sebagai kumpulan berbagai keinginan (*collective wills*) dan kebutuhan (*needs*) yang diinginkan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya (Nuechterlein, 1976).

Paul Seabury selanjutnya mendefinisikan bahwa kepentingan nasional suatu bangsa dapat dilihat dari melalui 2 (dua) sudut pandang, yaitu deskriptif dan normatif. Sudut pandang deskriptif melihat kepentingan nasional dicapai oleh negara dengan kekuatan pemerintah sendiri, sedangkan secara normatif kepentingan nasional harus dicapai melalui interaksi dengan berbagai negara di dunia (Seabury, 1960).

Selanjutnya, **Daniel S. Papp (1988)**, menekankan kepentingan nasional meliputi beberapa aspek yang saling terkait seperti ekonomi, ideologi, keamanan, kekuatan militer, moralitas, dan legalitas. (Papp,1988)

Dalam perspektif Hubungan Internasional kepentingan nasional haruslah mengarah pada gambaran seperti apa kebijakan dan perilaku politik luar negeri suatu negara, dengan berbagai kelebihan dan keterbatasan, sehingga perlu menjalin relasi dengan negara-negara lain dalam rangka menjaga eksistensinya di dunia. Sehubungan dengan hal itu maka dalam penyusunan kepentingan nasional perlu dilakukan penelitian tentang komponen-komponen kepentingan nasional yang penting dan perlu untuk dimasukkan dalam rumusan kepentingan nasional.

de Brouwer (2021) mengemukakan pandangan bahwa dalam perumusan kepentingan nasional harus terkandung 3 (tiga) komponen utama yaitu keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial. Alasannya adalah aspek keamanan sangat penting demi mempertahankan eksistensi suatu negara, sementara kemakmuran dan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari keinginan masyarakat yang membentuk negara sekaligus menjadi unsur kepentingan nasional yang paling esensial bagi suatu bangsa.

Selanjutnya, **Khan** (2022) berpendapat bahwa dalam merumuskan definisi, susunan, dan penentuan prioritas dalam kepentingan nasional terdapat sepuluh hal utama yang harus diperhatikan berdasarkan pada pertimbangan kekuatan dan potensi suatu negara, antara lain: kondisi geografi, latar belakang sejarah, situasi demografi, sistem politik, kekuatan militer, kapasitas ekonomi, basis teknologi, tingkat kepatuhan masyarakat lokal, lingkungan internasional, dan moral nasional.

Seiring perkembangan zaman maka dalam dunia politik juga mengalami perubahan paradigma dalam mendefinisikan kepentingan nasional berdasarkan sudut-sudut pandang tertentu. Selanjutnya setiap sudut pandang memiliki definisi, cara pandang, dan tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. **Burchill** (2005) menganalisis kepentingan nasional berdasarkan lima sudut pandang yaitu, *Realisme, Liberalisme, Marxisme, Konstruktivisme* dan *English School*

1. Realisme

Realisme adalah merupakan konsep awal dari kepentingan nasional. Secara etimologi realisme berasal dari kata “realism” (bahasa Inggris) yang berarti apa

adanya. Realisme melihat memandang dunia sesuai kenyataan yang ada berdasarkan prinsip Hobbesian. Realisme yang melihat dunia seperti apa adanya juga melihat bahwa dunia bersifat anarkis dan dipenuhi oleh rasa curiga dan rasa takut kepada negara lain. Berkaitan dengan kepentingan nasional, realisme mengakui bahwa hanya negara yang merupakan faktor paling dominan serta keamanan negara adalah hal yang paling utama.

2. Liberalisme

Liberalisme melihat kepentingan nasional tidak hanya semata-mata di dasarkan pada keamanan negara melainkan juga wajib ditopang oleh stabilitas di bidang ekonomi. Dengan demikian mekanisme pasar harus berjalan sehingga baik individu maupun masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dengan aman dan nyaman. Liberalisme percaya bahwa individu harus bebas dari penindasan oleh negara dan dengan demikian mampu menggunakan untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak dalam proses ekonomi. Selanjutnya, liberalisme kemudian mendorong manusia untuk menjadi kapitalis.

3. Marxisme

Marxisme mengkritisi pemikiran realisme yang berpandangan bahwa negara adalah faktor yang paling utama. Bagi kaum marxisme negara tidak harus menjadi pelaku utama yang mendefinisikan kepentingan nasional. Tiga prinsip utama berkaitan dengan kepentingan nasional menurut kaum Marxisme, yakni: kepentingan nasional dapat di interpretasikan oleh setiap orang secara berbeda, artinya tidak ada definisi yang tepat dan pasti tentang kepentingan nasional; dalam pengambilan keputusan pasti akan ada pihak yang dominan; dan dalam

pendefinisian kepentingan nasional, mesti dilaksanakan diskusi dan proses politik yang demokratis serta tidak bersifat teknokratis apalagi di definisikan sendiri oleh pihak tertentu seperti partai atau kelompok berkuasa

4. Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah sebuah konsep baru yang percaya bahwa negara bisa saja menjadi dinamis karena adanya perubahan dalam struktur-struktur secara internasional seperti: masyarakat, ideologi, ekonomi, dan politik sehingga kepentingan nasional suatu negara juga tidak bersifat pasti melainkan dikonstruksi secara sosial sesuai kondisi yang terjadi di dunia. Konstruktivisme berpendapat bahwa kepentingan nasional dapat beradaptasi menyesuaikan dengan struktur politik internasional.

5. *English School*

Pandangan *English School* tidak jauh berbeda dengan konstruktivisme. *English School* berkeyakinan bahwa sistem negara ada akibat adanya masyarakat internasional. Menurut pandangan *English School* politik internasional membentuk sebuah tatanan yang menyebabkan hubungan antar negara tidak selalu berakhir harus dengan konflik. Menurut perspektif *English School* kepentingan nasional hendaknya dibangun dengan dasar saling mengakui antar sesama negara, adanya rasa solidaritas, dan sikap hati-hati agar dampak kebijakan tersebut tidak merugikan pihak lain.

Sejalan dengan berkembangnya zaman maka pola interaksi masyarakat juga berubah yang berakibat pada bertambah banyaknya kepentingan nasional. Kepentingan tersebut mengalami diferensiasi, ada yang bersifat *Premier* (utama)

dan ada pula yang bersifat *sekunder*. Oleh karena itu kepentingan nasional harus di dikelompokkan sesuai dengan tingkat urgensinya dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada para perancang kebijakan tentang seberapa pentingnya suatu isu berdasarkan pada tingkat urgensinya. Dengan adanya klasifikasi kepentingan nasional maka negara dapat memutuskan cara yang paling tepat untuk mencapai kepentingan tersebut. Beberapa ahli berusaha untuk melakukan klasifikasi kepentingan nasional.

Robinson (1967) mengklasifikasikan kepentingan nasional kedalam enam kategori yakni *Primary Interest, secondary Interest, permanet interest, variable interest, general interest, specific interest*.

1. *Primary Interests* adalah sebuah kepentingan nasional yang bersifat mutlak yang harus dilaksanakan oleh sebuah negara. Menurut Robinson, kepentingan Nasional yang bersifat *Primary Interest* berkaitan langsung dengan aspek wilayah, politik dan budaya Masyarakat. Yang jika tidak dilaksanakan akan mengancam eksistensi sebuah negara. negara akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kepentingan Nasional tersebut berapapun biaya yang harus dibayar. Contohnya adalah Ketika sebuah negara di serang, maka negara tersebut akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kemerdekaanya
2. *Secondary Interests* adalah sebuah kepentingan nasional yang dianggap kurang penting. berbeda dengan *Primary Interest, Secondary Interest* adalah sebuah kepentingan Nasional yang jika tidak dilaksanakan tidak mengancam

eksistensi sebuah negara. Secondary interest dapat dinegosiasikan sesuai keperluan negara itu sendiri.

3. *Permanent Interests* merupakan sebuah kebijakan nasional yang dirancang oleh suatu negara yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama dan dilaksanakan secara konsisten. dalam kebijakan nasional yang bersifat permanent, kebijakan yang dibuat sangat jarang berubah karena kebijakan ini telah dirancang untuk kebutuhan jangka Panjang sebuah negara.
4. *Variable Interests*. Merupakan sebuah kebijakan yang disusun oleh pembuat kebijakan dalam negara didasarkan pada variabel yang lebih spesifik. Variabel ini pada dasarnya merupakan kepentingan yang didasarkan pada apa yang baik bagi suatu negara. Variable Interest banyak dipengaruhi oleh pemain kedua dalam pembuatan kebijakan yaitu Masyarakat, kelompok partisan politik, dan juga gerakan Masyarakat. Para pemain kedua ini menjadikan opini publik sebagai alat mereka untuk mempengaruhi kebijakan nasional Misalnya kebijakan Amerika Serikat pasca perang dunia kedua yang berusaha membendung penyebaran komunisme karena di dorong oleh opini publik yang negatif tentang komunisme
5. *General Interests* merupakan sebuah kebijakan yang disusun oleh pemerintah berdasarkan hubungan yang positif dengan negara-negara lain. Kepentingan Nasional yang bersifat General Interest lebih spesifik ke arah kerja sama di berbagai bidang seperti Ekonomi, Perdagangan, diplomatic dan lain-lain. Intinya dalam penyusunan kepentingan nasional hubungan negara menjadi faktor pertimbangan.

6. *Specific Interests*. hampir sama dengan *General Interest* dan *Variable Interest* yang memperhatikan variable yang spesifik dalam penyusunan kebijakan Nasional, tetapi *Specific Interest* merupakan kebijakan nasional yang dibuat untuk suatu masa dan waktu yang lebih spesifik. Ketika masa tersebut telah lewat dengan otomatis kebijakan tersebut akan hilang. Misalnya kebijakan yang dibuat Amerika Serikat pada masa perang dingin dengan Uni Soviet, Ketika runtuhnya uni Soviet kebijakan Amerika Serikat otomatis tidak berlaku lagi

Kepentingan Nasional merupakan sebuah kriteria wajib dalam pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan sebuah kebijakan terutama perihal kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*). kepentingan nasional harus menjadi faktor utama untuk mencapai apa yang telah menjadi definisi mengenai kepentingan nasional karena akhir dari kebijakan luar negeri adalah pemenuhan kebutuhan nasional.

Dalam konteks hubungan Amerika Serikat dan Israel unsur kepentingan nasional berperan sangat signifikan dalam pola interaksi antara kedua negara tersebut. Berdasarkan klasifikasi kepentingan nasional menurut Robinson (1967), hubungan Amerika Serikat dan Israel dapat dikategorikan sebagai permanen interest dan juga variable interest dimana terdapat pihak kedua selain negara yang menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat agar memasukan kepentingan nasional Israel ke dalam kepentingan nasionalnya sendiri dan kebijakan tersebut di laksanakan dalam jangka waktu yang lama.

B. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Di dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar tentang adanya individu atau kelompok yang dengan berbagai upaya mampu mempengaruhi opini publik maupun kebijakan dalam negeri maupun luar negeri suatu negara. Cara-cara yang digunakan oleh individu maupun kelompok tersebut dikenal dengan istilah lobi.

Kata Lobi berasal kata *lobia* atau *lobium* (bahasa Latin) yang merujuk pada suatu tempat berbentuk ruang atau aula. Pengertian ini kemudian diperluas dengan memasukkan unsur aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di ruang tersebut sehingga memberikan makna baru. Secara umum lobi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan, tingkah laku pejabat negara, ataupun badan-badan penegak hukum lainnya. Para pelaku lobi biasa disebut *lobiist*.

Di Amerika Serikat istilah lobi sudah mulai digunakan pada awal abad ke-19 ketika di wilayah timur laut Amerika Serikat gedung-gedung digunakan sebagai tempat pertemuan antara para pelobi dengan para anggota senat. Para pelobi tersebut dibayar oleh klien mereka untuk mempengaruhi keputusan dalam pembuatan undang-undang (Chen, 2023).

Berdasarkan afiliasi pekerjaannya para pelobi dibagi menjadi dua yakni para pelobi yang bekerja secara individu (tidak terafiliasi) dan secara kelompok. Para pelobi yang bekerja secara kelompok (atau terafiliasi dengan kelompok) umumnya bekerja untuk kelompok kepentingan (*Interest Group*). Para pelobi yang bekerja mewakili kelompok kepentingan ini dalam melakukan aktivitasnya bersifat menekan (*pressure*) kepada orang yang menjadi sasarannya. Selanjutnya, para

pelobi akan menggunakan berbagai cara agar memiliki akses ke sasaran untuk melakukan lobi sehingga kepentingan kelompok yang mereka wakili dapat terwujud.

Kelompok Kepentingan dikenal juga dengan beberapa istilah lain yaitu: kelompok lobi, *kelompok kepentingan khusus*, *kelompok penekan* dan *kelompok asosiasi publik*. Kelompok kepentingan ini berasal dari berbagai latar belakang dengan tujuan yang berbeda. Ada kelompok Kepentingan (*Interest Group*) di bidang sosial, ekonomi, politik dan juga agama. Meskipun berasal dari latar belakang dan memiliki fokus yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni agar kepentingannya terlaksana.

Kelompok kepentingan merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyusunan suatu kebijakan politik (Delibashzade et al., 2015). Kebijakan politik adalah akumulasi dari berbagai aspirasi masyarakat, dengan berbagai perbedaan kepentingan dan keinginan yang tidak dapat diakomodasi secara individu, yang disatukan menjadi sebuah kebijakan public melalui suatu proses politik dalam lembaga-lembaga politik seperti pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (Bueno, 2013). Karena tidak semua pandangan individu dapat menjadi kebijakan publik maka diperlukan sebuah kelompok tertentu, yakni kelompok kepentingan, yang dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam penyampaian aspirasi mereka.

Kelompok kepentingan juga diartikan sebagai sekelompok orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama dan meorganisasikan diri agar kepentingannya

dapat terlindungi (Isabela, 2022). Menurut Benditt (1975) kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang mempunyai kesamaan tujuan dan dalam upayanya untuk mewujudkan tujuan tersebut harus mampu memenangkan persaingan dengan kelompok kepentingan lainnya. Kelompok kepentingan juga merupakan suatu kelompok yang selalu berusaha untuk mempengaruhi opini publik dan memiliki ciri khas tertentu yang dirumuskan oleh Fraussen (2020) sebagai berikut:

1. Memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan sehingga dapat berkumpul dan membentuk organisasi
2. Memperjuangkan suatu isu secara terstruktur dan sistematis
3. Mengatasnamakan kelompok kepentingan ketika menyelenggarakan suatu kegiatan atau aktifitas
4. Kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh kelompok kepentingan ini tidak bertujuan untuk mendapatkan jabatan publik.
5. Ketika melakukan kegiatan selalu mengambil tema yang berhubungan dengan suatu isu publik sehingga diharapkan dapat mempengaruhi opini masyarakat dan kebijakan pemerintah
6. Di dalam sebuah kelompok terdapat berbagai golongan kepentingan tergantung dari karakteristik organisasi atau kepentingan kelompok tersebut

Mencapai keberhasilan dalam mempengaruhi suatu kebijakan merupakan mimpi dari semua kelompok Kepentingan. Keberhasilan sebuah kelompok kepentingan dalam mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah tidak lepas dari beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sumber dana, dan yang paling penting adalah koneksi yang dimiliki oleh orang-orang di dalam sebuah

kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan meskipun sama-sama memperjuangkan kepentingan namun secara umum dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu (Maiwan,2016):

1. Kelompok Kepentingan Privat

Kelompok Kepentingan Privat dapat diartikan sebagai kelompok kepentingan yang hanya melakukan kegiatan Lobi dengan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja, misalnya guru, dokter, pengusaha dll.

2. Kelompok Kepentingan Publik

Kelompok kepentingan Publik adalah kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara umum tanpa terbatas pada golongan/kelompok tertentu. misalnya kelompok kepentingan yang melobi pemerintah untuk membuat undang-undang tentang lingkungan

Menurut Almond & Powell (1969) terdapat empat jenis kelompok kepentingan yaitu :

1. Kelompok kepentingan institusi (*Institutional interest groups*) adalah kelompok kepentingan yang terdiri dari orang-orang dengan memiliki latar belakang yang baik, berpendidikan, dan berpengaruh secara Politik. Kelompok ini memiliki kelembagaan formal dan secara rutin merencanakan suatu kegiatan sehingga sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat dengan cakupan yang luas (ekonomi, sosial, politik, dan budaya). Contoh kelompok kepentingan ini adalah institusi tentara, polisi, dan lembaga pemerintahan.

2. Kelompok kepentingan asosiasi (*Associational interest group*), adalah kelompok kepentingan yang terorganisir baik dari segi keanggotaan maupun kerja organisasi. Kelompok kepentingan ini berasal dari dunia pekerjaan/profesi yang sama, dan tujuan pendirian kelompok kepentingan ini adalah untuk memperjuangkan anggota mereka berdasarkan fokusnya.
3. Kelompok kepentingan non-asosiasi (*Non-associational interest group*) merupakan kelompok kepentingan yang terorganisir secara informal, keanggotaan bersifat flexible, dan aktivitasnya hanya pada isu tertentu saja. Kelompok kepentingan ini terdiri dari orang yang berlatar belakang yang sama, misalnya agama, kebudayaan, etnis dan lain-lain.
4. Kelompok kepentingan anomis (*Anomic interest groups*) adalah kelompok kepentingan yang tercipta secara tidak sengaja (spontan), dimana anggotanya berasal dari berbagai elemen masyarakat namun memiliki kemampuan komunikasi politik yang rendah. Kelompok kepentingan ini terbentuk sebagai jawaban dari kejadian tertentu, serta biasanya menggunakan aksi demonstrasi yang mengakibatkan keributan, namun apabila aspirasi mereka telah tersampaikan akan segera membubarkan diri

Dalam usaha untuk menyampaikan aspirasinya sebuah kelompok kepentingan harus menjalankan langkah-langkah yang tepat agar kepentingannya dapat terwujud. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan dua pendekatan (Jordan & Maloney) yakni merumuskan isu-isu yang ingin disampaikan dengan narasi yang menarik dan ketika ditawarkan dapat di terima oleh kelompok partai politik. Namun keberhasilan langkah sangat ditentukan oleh berjalan baiknya

sistem dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sehingga kelompok kepentingan dapat menyisipkan kepentingannya kepada partai politik. Kondisi seperti ini memungkinkan kelompok kepentingan untuk melakukan tawar menawar kepada partai politik guna memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut.

Selanjutnya, pendekatan kedua adalah kelompok kepentingan akan secara langsung bertemu dengan pemerintah setelah menyusun dengan baik isu-isu yang ingin diperjuangkan. Dalam tahap ini proses diawali dengan kelompok kepentingan dengan sengaja melemparkan sebuah isu tertentu melalui media. Cara-cara seperti ini ditempuh jika politik dalam negara tersebut tidaklah baik. Dimana, masyarakat kurang mempercayai partai politik. Dengan kurangnya kepercayaan kepada partai politik, kelompok kepentingan akan langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui pendekatan-pendekatan kepada para pejabat.

Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok kepentingan umumnya menggunakan strategi, antara lain: lobi, penggunaan media massa, dan melakukan tekanan melalui kelompok masyarakat akar rumput agar kepentingannya dapat tersampaikan kepada pemerintah (Maiwan, 2016).

Pertama, adalah dengan menggunakan sarana lobi melalui pendekatan kepada para pejabat terutama pembuat kebijakan. Sebuah kelompok kepentingan biasanya memiliki seorang atau beberapa orang pelobi yang baik dan dapat berasal dari profesional yang dipekerjakan maupun berasal dari anggota dari kelompok kepentingan itu sendiri. Kualitas seorang pelobi sangat mempengaruhi kesuksesan

dari kelompok yang diwakilinya. Sebagai contoh kelompok kepentingan AIPAC merupakan kelompok kepentingan yang terkenal unggul dalam melobi pemerintah Amerika Serikat. Keberhasilan AIPAC ini tidak terlepas dari kehandalan para pelobi yang dimilikinya.

Kedua, melakukan kampanye melalui platform media yang cukup dominan dalam kehidupan saat ini. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi maka pola penyampaian informasi juga mengalami perubahan. Kelompok kepentingan yang besar dan mapan biasanya menggunakan teknologi media sebagai sarana penyampaian kepentingan mereka. Saat ini cukup banyak kelompok kepentingan yang memiliki perusahaan media untuk memudahkan penyampaian kepentingannya agar jangkauan informasi tentang kelompok mereka dapat menjangkau semua kalangan.

Ketiga melakukan *grass-roots pressure* (tekanan melalui kelompok masyarakat akar rumput). Seperti telah dijelaskan pada bagian kedua perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pola komunikasi yang tampak dari cepatnya seseorang mendapatkan sebuah informasi yang oleh kelompok kepentingan dapat digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan massa untuk ikut serta dalam demonstrasi, pertemuan publik, gerakan pawai, hingga rapat akbar.

Dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas, beberapa kelompok kepentingan berhasil mencapai kesuksesan dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara. Di negara-negara dengan sistem demokrasi kelompok kepentingan

memiliki pengaruh yang besar dalam penyusunan kebijakan karena sistem demokrasi menjamin hak kelompok kepentingan untuk melakukan pendekatan (lobi), sehingga kelompok kepentingan dapat melakukan upaya pendekatan kepada pejabat negara terutama anggota legislatif agar kepentingannya bisa masuk dalam pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Namun demikian ada juga kelompok kepentingan yang tidak berhasil dalam usahanya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Semua itu sangat tergantung pada kemampuan lobi dari kelompok kepentingan dan sumber-sumber lainnya seperti uang dan relasi politik.

Dalam konteks hubungan Amerika Serikat dan Israel, kelompok kepentingan AIPAC adalah kelompok kepentingan yang sangat kuat pengaruhnya dalam mempengaruhi dinamika hubungan Amerika Serikat dan Israel. Sejauh mana pengaruh kelompok kepentingan AIPAC ini terhadap dinamika hubungan Amerika Serikat dan Israel akan dibahas secara terinci pada bagian pembahasan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian akan yang menganalisis secara mendalam pengaruh kelompok kepentingan AIPAC terhadap Hubungan Amerika Serikat-Israel pada masa Presiden Donald Trump (2017-2021). Penelitian ini akan menggunakan teori kepentingan nasional (*National Interest*) dan teori kelompok kepentingan (*Interest Group*) sebagai landasan untuk analisisnya. Selanjutnya, untuk kelengkapan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini peneliti melakukan tinjauan kritis terhadap dokumen kunci yang telah dikeluarkan sebelumnya dan terkait dengan tujuan penulisan skripsi.

Dokumen pertama adalah **Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mendukung Normalisasi Hubungan Israel dan Uni Emirat Arab Melalui ABRAHAM ACCORDS Pada Tahun 2020**. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendukung normalisasi hubungan antara Israel dan UAE. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional (*National Interest*) dan teori pengambilan Keputusan (*Decision making theory*) sebagai unit analisis.

Dokumen kedua berupa penelitian berjudul **Pengaruh Diplomasi AIPAC Terhadap Kebijakan Amerika Serikat Mendukung Normalisasi UEA-ISRAEL Pada Tahun 2020**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh diplomasi AIPAC dalam mendukung Normalisasi UAE-Israel. Penelitian ini menggunakan konsep proses perumusan kebijakan (*Decision making Process*), konsep kelompok penekan (*pressure groups*) dan konsep kepentingan nasional (*National Interest*).